

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskriptif teori

Membahas tentang bencana Corona atau pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menjangkit sistem pernapasan manusia melalui penularan droplet yang keluar ketika seseorang batuk atau bersin. Penyakit ini telah meluas hingga menyebar keseluruhan penjuru dunia. Oleh sebab itu setiap negara di dunia melakukan berbagai upaya pencegahan dan juga penanganan untuk bencana covid, Indonesia sendiri melakukan penanganan yang cukup terlambat di banding dengan negara tetangga yang segera melakukan pencegahan ketika wabah covid di sebarluaskan.<sup>1</sup>

Setelah pemerintah mengumumkan adanya pasien pertama dan kedua yang terkena covid, penyebaran menjadi ketara dan tidak terkontrol yang menyebabkan semakin meluasnya penyebaran covid di Indonesia, setelah hal itu terjadi banyak pihak yang merespon dengan membantu pemerintah untuk menangani wabah tersebut, tak terkecuali MDMC lembaga masyarakat dari Muhammadiyah yang berfokus untuk menangani bencana turut ambil bagian untuk ikut ambil bagian untuk membantu pemerintah dalam menangani wabah penyakit. MDMC yang berkerjasama dengan pemerintah tidak hanya di pusat saja namun MDMC berpartisipasi dalam penanggulangan bencana di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan Persatuan Muhammadiyah, yang dalam kegiatannya meliputi pengembangan MDMC di tingkat Pimpinan Wilayah (Propinsi) Muhammadiyah dan MDMC di tingkat Pimpinan Daerah (Kecamatan) Muhammadiyah.

#### 1. Covid-19 Sebagai Bencana

Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi virus baru. Virus ini menyebabkan penyakit di banyak negara lain juga. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menamai virus ini sindrom pernafasan akut parah coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini menyebabkan banyak orang sakit yang berkelanjutan dan beberapa diantaranya mengalami kematian dan penyakit ini dikenal sebagai penyakit coronavirus 2019. Pandemi COVID-19 ini memiliki

---

<sup>1</sup> “Ini Dia Cara Penyebaran Virus Corona” diakses pada tanggal 2 juli 2022, pukul 20.00 WIB <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/bagaimana-penyebaran-virus-corona/>

implikasi sosial dan ekonomi. Dalam keadaan seperti itu siap merespons, terutama terkait dengan sistem kesehatan yang ada.<sup>2</sup>

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus baru. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan di China pada akhir 2019 yang menyebar keseluruh dunia mulai januari hingga maret dan kini telah mengakibatkan pandemi dan menyebar kesebagian besar dunia. Gejala paling sering di temui di virus COVID-19 adalah batuk, demam, dan kesulitan bernapas. Infeksi Covid-19 juga cukup mematikan yang menelan banyak korban jiwa di banyak negara.<sup>3</sup> Virus ini menjadi masalah paling menakutkan di dunia, termasuk Indonesia. Banyak negara memilih tindakan pencegahan ekstrem seperti lockdown, Hal ini di karenakan mawasnya penyebaran serta mudahnya seseorang terjangkit Covid-19. Dan jika Indonesia menerapkan sistem lockdown maka akan timbul dampak positif serta dampak negatif dari masalah pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah adalah lembaga yang terdiri dari sekelompok orang yang mengatur masyarakat dengan cara dan strategi yang berbeda dengan tujuan agar masyarakat dapat terorganisir dengan baik. Demikian pula, keberadaan pemerintahan desa sudah sangat dikenal dalam struktur pemerintahan Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Peran lembaga pemerintah desa diharapkan mampu menumbuhkan sikap solidaritas sosial untuk memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Keadaan Peringatan darurat adalah ketika potensi bencana sedang terjadi dan diperingatkan oleh pemerintah. Artinya ada bahaya dan orang perlu bersiap. Indonesia perlu mewaspadaai potensi bencana dan siap merespons dengan cepat jika terjadi karena Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi yang berskala global. Dampaknya Dampak bencana akan sangat luas, mempengaruhi hal-hal seperti politik, ekonomi, kehidupan sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia juga perlu bekerja sama dengan lembaga swasta maupun masyarakat lain, hal fital milik pemernitah seperti tenaga medis dan infrastruktur dari pemerintah, tidak bisa selalu di

---

<sup>2</sup> Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20 no 2 (2020): 706.

<sup>3</sup> Kemkes, "Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19". (2020)

<sup>4</sup> Wandra, dkk, WABAH CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Pada Desa Pandansari Lor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang), *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2 no 5 (2021): 1628.

andalkan. Dan oleh sebab itu pemerintah membutuhkan peran dan andil masyarakat serta sistem kesehatan yang mendukung dan mencukupi yang di gunakan sebagai penanganan.

Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan langkah-langkah social distancing dan menetapkan prinsip-prinsip protokol kesehatan seperti penggunaan masker, cuci tangan/ atau menggunakan hand sanitizer, social distancing/penghindaran dari keramaian, peningkatan daya tahan fisik, pola makan seimbang, manajemen penyakit bersama dan kewaspadaan Beberapa orang sangat rentan, dan ini dapat membuat mereka berisiko mengalami masalah kesehatan. Kenyataannya adalah tidak semua orang mengikuti praktik yang sehat untuk menghadapi pandemi COVID-19.

## 2. *Collaborative Governance* Sebagai Alternatif Kerjasama

### a) Pemahaman Tentang *Collaborative Governance*

Istilah *Collaborative Governance* adalah cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan partisipasi langsung pemangku kepentingan di luar pemerintah atau negara, yang bertujuan untuk mencapai Kami percaya bahwa konsensus dan pertimbangan dari sudut pandang yang berbeda sangat penting dalam pengembangan kebijakan publik dan program publik..<sup>5</sup>

Tata kelola kolaboratif berfokus pada Institusi publik yang memiliki banyak kekuatan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Mereka bekerja sama dengan orang-orang penting lainnya untuk mencoba dan menghasilkan solusi yang dapat disetujui semua orang. Tata kelola kolaboratif membutuhkan keadilan sosial sekaligus melayani kepentingan publik. Kolaborasi adalah konsep yang dapat membantu organisasi lain bekerja sama untuk memecahkan masalah yang tidak dapat atau tidak mudah mereka selesaikan sendiri. Kolaborasi adalah suatu bentuk kegiatan bersama di mana dua atau lebih lembaga bekerja sama untuk menambah "nilai publik" daripada bekerja secara individual.

*Collaborative Governance* berarti bahwa satu atau lebih Organisasi non-pemerintah (LSM) adalah lembaga publik yang bekerja dengan organisasi lain untuk mengembangkan kebijakan publik atau mengelola aset publik. Ini berarti bahwa organisasi-organisasi ini berpartisipasi dalam proses

---

<sup>5</sup> Chris Ansell, Alison gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 no 4 (2008): 543–571.

pengambilan keputusan formal untuk membantu membentuk atau mengimplementasikan kebijakan atau program publik.

Kemitraan publik-swasta berbeda dengan jenis kerjasama lainnya, seperti kontrak kerja, privatisasi, dan outsourcing. Kemitraan ini lebih kepada pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk memecahkan satu bagian dari masalah, daripada bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama.<sup>6</sup> Kerjasama antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dapat dibagi menjadi beberapa bidang kerjasama, yaitu: (1) kerjasama antar instansi pemerintah (internal), (2) kerjasama antara instansi pemerintah dengan lembaga komersial, (3) kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil. hubungan agensi. Kolaborasi antar instansi pemerintah (internal) dalam melaksanakan problem solving, ada instansi pemerintah yang fokus pada satu sektor saja, namun ada juga instansi pemerintah yang bekerja sama dalam pelayanan publik (*cross-agency*) karena perlu adanya engagement antar instansi.

Di negara-negara di mana terdapat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil, pemerintah seringkali diuntungkan dengan kehadiran organisasi masyarakat sipil karena mereka dapat memberikan layanan yang mungkin tidak dapat disediakan oleh pemerintah sendiri. Misalnya, organisasi masyarakat sipil mungkin lebih baik dalam meningkatkan kesadaran tentang isu-isu tertentu, atau mungkin lebih baik dalam mengorganisir protes. Beberapa istilah yang digunakan Selsky dan Parker untuk merujuk pada lembaga masyarakat sipil atau kartu merah adalah “masyarakat sipil yang dibuat”, “negara bayangan”, atau “pihak ketiga pemerintah”, yang semuanya merujuk pada lembaga masyarakat sipil yang didirikannya. dan inisiatif pendanaan setidaknya pada awalnya dari pemerintah.

Beberapa kemitraan antara lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil melibatkan organisasi yang independen, didanai pemerintah, atau keduanya. Jenis organisasi ini memiliki sifat yang berbeda, sehingga masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. motif kerjasama, sifat kerjasama, bidang kerjasama dan aspek lainnya yang berbeda.

---

<sup>6</sup> Agus Dwiyanto, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, (Yogyakarta: UGM Press. 2010), 27.

Kemitraan yang disponsori pemerintah antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil cenderung lebih terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Adanya kerjasama dengan lembaga yang sudah mapan (bersponsor), pemerintah berharap dapat memberdayakan lembaga tersebut untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menangani isu-isu tertentu atau menyebarkan nilai-nilai dan kepentingan pemerintah. Kerjasama antara lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sipil yang independen sering didorong oleh keyakinan bahwa pencapaian layanan publik dan kegiatan pemerintah partisipatif ditujukan untuk memberdayakan warga negara, atau organisasi yang percaya pada kegiatan pemerintah berdasarkan pertimbangan etis yang penting penyedia dan layanan publik harus menjadikan warga dan pengguna jasa sebagai badan utama, dan perlu berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan ini.

Dalam hal dampaknya terhadap peningkatan citra dan kepercayaan Kemitraan antara lembaga publik dalam lembaga pemerintah, pemerintah dan lembaga masyarakat independen tentu memberikan kontribusi lebih dari lembaga masyarakat sipil milik negara. Pendekatan *Collaborative Governance* Memahami *Collaborative Governance* adalah tentang memahami kolaborasi lintas departemen, seperti yang terlihat pada penekanan pada lima hal<sup>7</sup>, antara lain:

- a. Kondisi Awal (*Initial Conditions*) berfokus pada topik yang lebih luas terkait dengan lingkungan di mana kolaborasi akan berlangsung dan kemungkinan akan adanya kegagalan kedepannya.
- b. Komponen Proses (*Process Components*) Para peneliti menyoroti beberapa aspek proses kolaboratif. Area-area ini meliputi: kesepakatan awal, membangun kepemimpinan, membangun legitimasi, membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan perencanaan.
- c. Struktur dan Tata Kelola (*Structure and Governance*) adalah konsep yang sangat berkembang dalam teori organisasi yang sering kali mencakup tujuan, Spesialisasi tugas dan pembagian kerja, aturan dan prosedur operasi standar, dan hubungan wewenang. Struktur melibatkan komponen vertikal dan horizontal.

---

<sup>7</sup> John M Bryson, dkk, "The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature", *Jurnal Public Administration Review*, 66 no 1 (2006): 44-55.

- d. Kontinjensi dan Kendala Tiga faktor yang mempengaruhi proses, struktur, dan tata kelola kerjasama, dan keberlanjutan secara keseluruhan, meliputi (1) jenis kerjasama, (2) ketidakseimbangan kekuatan di antara anggota, dan (3) logika kelembagaan yang bersaing dalam kolaborasi.
- e. Hasil dan Akuntabilitas. Hasil kerja sama lintas batas tercermin dalam tiga aspek: (1) nilai publik; (2) efek pertama, kedua, dan ketiga; dan (3) ketahanan dan penilaian ulang. Akuntabilitas Akuntabilitas dalam kolaborasi merupakan masalah yang kompleks karena tidak jelas siapa dan untuk apa kolaborasi itu akuntabel. Anggota kolaborasi atau pemangku kepentingan mungkin memiliki perspektif yang berbeda ketika menilai hasil yang dicapai.

#### b) Tahapan *Collaborative Governance*

Komponen CGR adalah upaya untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai bagian dari proses kolaboratif termasuk, sebagai berikut 1) dinamika kolaborasi, 2) tindakan-tindakan kolaborasi, dan 3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.<sup>8</sup>

- a. Dinamika Kolaborasi menurut para peneliti merupakan proses kolaboratif sebagai langkah linier yang terjadi dari waktu ke waktu, dari definisi masalah hingga penetapan agenda dan implementasi. Untuk melihat dinamika proses kolaboratif sebagai siklus interaksi oriteratif. fokus pada tiga komponen interaktif dari dinamika kolaboratif. Komponen-komponen ini meliputi: Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

Kesimpulan akhir tentang dinamika kerjasama ini adalah apakah dinamika tersebut ditentukan oleh tiga komponen, yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan kemampuan bertindak bersama dengan berbagai elemen. Dinamika tersebut berbentuk suatu siklus dimana masing-masing komponen saling mempengaruhi (begitu pula dengan unsur-unsurnya, dan tidak dapat dipungkiri bahwa unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi unsur-unsur antar komponen).

---

<sup>8</sup> Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq, "COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)". *Jurnal Fisip*,

- b. Tindakan-tindakan dalam Kolaborasi (*Actions*) Tindakan kolaboratif dimotivasi oleh gagasan bahwa tujuan akan sulit dicapai jika satu kelompok atau organisasi bertindak sendiri. Tindakan kolaboratif merupakan inti dari kerangka *Collaborative Governance*. Namun, banyak peneliti yang tidak mempelajari dan lebih memperhatikan tindakan kolaborasi. Menurut Innes dan Booher dari Emerson, tindakan kolaborasi adalah hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang melibatkan dampak. Memang, proses dan hasil pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri.

Tindakan kolaborasi yang efisien harus dinyatakan secara implisit melalui perumusan tujuan yang jelas. Karena langkah-langkah kerja sama sulit untuk diterapkan jika tujuan yang harus dicapai melalui kerja sama itu sendiri ditentukan dengan tidak jelas. Dalam praktiknya, kegiatan kolaboratif sangat beragam, seperti memberdayakan masyarakat, menetapkan proses perizinan, mengumpulkan sumber daya, memantau sistem/praktik manajemen baru, dll. Hasil dari tindakan ini kemudian membawa efek sementara langsung, yang dapat ditelusuri kembali ke dinamika kolaborasi, dan efek jangka panjang.

Beberapa kegiatan kerjasama memiliki tujuan yang sangat luas, seperti: definisi langkah-langkah strategis dalam topik/bidang kebijakan kesehatan. Tetapi ada juga banyak kemitraan dengan tujuan yang didefinisikan secara sempit, seperti pengumpulan data spesifik dan proyek analisis. Beberapa kegiatan kolaboratif dapat dilakukan oleh semua pemangku kepentingan secara bersamaan, sementara yang lain hanya dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing pemangku kepentingan.

- c. Dampak dan Adaptasi Hasil Tindakan pada Dinamika Kolaborasi (*Impacts and Adaptation for Collaboration Dynamics*) Efek dan Adaptasi untuk Dinamika Kolaborasi Efek CGR yang relevan adalah efek sementara yang terjadi selama proses kolaborasi. Properti efek diharapkan, tidak diharapkan, dan tidak terduga. Efek yang diharapkan adalah “small win”, yaitu hasil positif yang membuat aktor tetap bersemangat. Walaupun efek yang tidak terduga, seperti hambatan dalam pelaksanaan

kerjasama. Efek tak terduga juga dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dalam proses kolaboratif.

Efek yang berbeda ini menciptakan umpan balik, yang kemudian dimodifikasi bersama. Penyesuaian yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi tersebut merespon umpan balik dari masing-masing aktor yang ada. Kecocokan yang baik adalah yang dapat dilaksanakan oleh semua pelaku kolaborasi, yaitu kepentingan organisasi tidak mengganggu kerjasama, yang mengarah pada upaya pemanfaatan kerjasama yang lebih menguntungkan bagi organisasi itu sendiri. Penyesuaian tersebut harus didasarkan pada kebutuhan perubahan kerjasama yang paling sentral untuk dapat mempertahankan kemajuan kerjasama, dan ini juga mempengaruhi keterbukaan kerjasama itu sendiri.

### c) **Tantangan Collaborative Governance**

Literatur tentang temuan ilmiah menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif biasanya menghadapi tiga jenis tantangan yang sangat kompleks, yaitu (1) tantangan dalam memecahkan masalah substantif, (2) tantangan dalam proses kolaboratif, dan (3) tantangan dalam akuntabilitas multi-relasional.<sup>9</sup>

- a. Tantangan pemecahan masalah Collaborative governance yang berorientasi pada pemecahan masalah yang lebih spesifik, seperti masalah "kriminal", dapat dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan akar penyebabnya. Identifikasi masalah ini dikenal sulit karena tidak biasa dan kompleks. Masalah seperti ini membuat sulit untuk menyepakati "masalah dan akar masalahnya", termasuk "bagaimana menyelesaikannya." Masalah akan menjadi semakin sulit untuk didefinisikan karena sudut pandang yang berbeda dari semua pihak yang terlibat.
- b. Tantangan dalam Proses Kolaborasi langkah pertama dalam setiap aktivitas *collaborative governance* yang berorientasi pada masalah adalah menyepakati tujuan dan metode yang akan digunakan. Seringkali, semua pihak yang terlibat memiliki kepentingan potensial dalam menjalin kerjasama untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam hal ini, hal-hal seperti nilai, tujuan, dan komitmen tumpang tindih, tetapi ada juga hal yang sangat berbeda. Semakin banyak pihak

---

<sup>9</sup> M. Waardenburg, dkk, "Paradoxes of Collaborative Governance: Investigating the Real-Life Dynamics of Multi-Agency Collaborations Using a Quasi-Experimental Action-Research Approach", *Jurnal Public Management Review*, 22 no 3 (2020): 386–407.



yang terlibat, semakin sulit menemukan titik temu. Jadi tantangan utama di sini adalah bagaimana mengubah konflik “permusuhan” negatif menjadi konflik positif “konstruktif”, yang nantinya dapat memperluas tujuan para pihak dan dapat mengarah pada solusi dari masalah yang perlu dipecahkan.

- c. Tantangan Akuntabilitas dengan Multi-Relasi kategori terakhir dari tantangan *collaborative governance* adalah hubungan kolaboratif dengan pihak "di luar" (termasuk mereka yang "di dalam" kolaborasi itu sendiri), yang melibatkan bagaimana para pihak bertindak secara kolektif. Akuntabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks dalam kerjasama karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kerjasama tersebut dan untuk apa. Ketika kerjasama berlangsung, timbul tanggung jawab, serta konflik atau ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Evaluasi kolaborasi harus mencerminkan tidak hanya sudut pandang semua pihak, tetapi juga sudut pandang pihak eksternal terhadap kolaborasi, dan pada akhirnya mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kolaborasi hampir selalu menghadapi ketegangan antara kegiatan kolaboratif itu sendiri dan akuntabilitas yang mereka setujui.

#### **d) Kriteria Keberhasilan dan Kegagalan *Collaborative Governance***

Dalam *collaborative governance*, ada kriteria yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang hal ini ketika mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan praktik *collaborative governance* dalam implementasinya. Dalam pelaksanaan kerjasama terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi berhasil tidaknya kerjasama.<sup>10</sup> Menurut Pemerintah Kanada, terhambatnya kerjasama dan partisipasi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) faktor budaya; (2) faktor kelembagaan atau institusi; (3) faktor politik.<sup>11</sup>

- a. Faktor Budaya Kolaborasi kecenderungan budaya untuk mengandalkan prosedur, tidak berani menerobos, dan tidak berani mengambil risiko menyebabkan kegagalan kolaborasi. Membangun kerjasama yang efektif menuntut

---

<sup>10</sup> Retno Sunu Astuti, dkk, *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*, (Semarang :Universitas Diponegoro Press. 2020), 92.

<sup>11</sup> Government of Canada. *Collaborative Governance and Changing Federal Roles*. (2008).

pegawai negeri sipil dan Para pemimpin memiliki keterampilan dan kemauan untuk bekerja sama secara pragmatis, untuk mencapai hasil. Ini hanya mungkin jika mereka tidak terlalu bergantung pada prosedur dan mengambil risiko. Ini adalah salah satu hambatan untuk kolaborasi yang efektif.

Kerjasama tersebut gagal karena pemerintah masih mempertahankan filosofi top-down ketika bekerja sama dengan pihak lain, pemerintah masih mendominasi, dan kesepakatan tidak dilaksanakan dengan kerjasama dan mentalitas egaliter yang diperlukan agar kerjasama dapat berjalan. Kolaborasi bisa gagal karena kelompok kepentingan masyarakat bisa menghalangi, dan pemerintah atau kelompok dominan bisa melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil.

- b. Faktor Institusi Kolaborasi dapat disebabkan oleh kecenderungan lembaga-lembaga (terutama dari pemerintah) Kolaborasi melibatkan kerja sama dalam struktur hierarkis. Ini berarti bahwa lembaga yang berbeda memiliki tanggung jawab yang berbeda dan bertanggung jawab satu sama lain. Struktur vertikal, seperti akuntabilitas kelembagaan dan arah kebijakan, tidak cocok untuk kolaborasi karena akan membutuhkan banyak pekerjaan untuk menerapkannya, atau organisasi horizontal antara pemerintah dan non-pemerintah.

Kolaborasi cenderung spontan dan terkadang Ada beberapa hal yang tidak selalu harus mengikuti aturan yang sama seperti hal lainnya. Terkadang hal-hal dapat terjadi lebih cepat atau mudah tanpa mengikuti prosedur tradisional kehidupan sehari-hari atau sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) Sering kali, dalam organisasi publik yang termekanisasi, hal-hal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, ada perbedaan tujuan dan kebutuhan yang harus dipenuhi agar organisasi ini menjadi demokratis, dan hal tersebut tidak selalu dapat digantikan.

- c. Faktor Politik Kolaborasi bisa gagal karena tidak cukup pemimpin yang mampu menghasilkan ide-ide inovatif untuk mencapai berbagai tujuan politik yang saling bertentangan. Para pemimpin ini adalah mereka yang dapat melihat nilai dalam menggabungkan berbagai nilai bersama untuk menciptakan visi yang kuat dan terpadu dalam collaborative governance, menginspirasi agenda yang ditetapkan, dan menghasilkan hasil yang positif.

Melalui kerjasama ini, konflik tujuan dari kelompok yang berbeda sering bertentangan, namun hal ini dapat diminimalkan dengan menggunakan kesepakatan yang spesifik dan membuat setiap orang yang terlibat menyadari perubahan yang mungkin terjadi. Jika perjanjian kerja sama tidak diperbarui atau diubah, itu bisa gagal karena kelompok yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda akan mulai berbenturan.

### 3. Mengenal Masyarakat Madani

#### a) Masyarakat madani

Wacana masyarakat madani Indonesia memiliki banyak kesamaan dalam terminologi dan referensi, namun memiliki karakteristik dan peran yang berbeda. Banyak ahli Indonesia merujuk pada sejarah perkembangan masyarakat sipil Barat (*Civil Society*) dan menggunakan istilah yang berbeda dengan arti yang sama. Dalam hal ini, menurut Sahrul, para ahli masih memiliki pandangan berbeda tentang apa yang dimaksud dengan *civil society*. Beberapa orang mengatakan bahwa masyarakat madani memiliki karakteristik yang berbeda dari *Civil Society*. Akan tetapi dikatakan pula bahwa masyarakat madani adalah yang disebut *Civil Society* atau kata masyarakat madani adalah makna kata yang diindonesiakan.<sup>12</sup>

Sebagaimana kita ketahui bersama, menurut penjelasan sebelumnya masyarakat sipil (*Civil Society*) memiliki pengertian yang hampir sama dengan masyarakat madani, sehingga menurut akarnya, masyarakat madani berasal dari kata 'madaniyah' yang berarti 'peradaban'. Jadi, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, artinya memiliki nilai-nilai yang beradab. Istilah 'masyarakat sipil' pertama kali dipopulerkan oleh Naquib al-Attas, yang merupakan terjemahan dari kata Arab 'mujtama madani', yang memiliki dua arti. Yang pertama adalah 'orang kota' karena Madani merupakan turunan dari kata Arab 'Madinah', yang berarti 'kota'. Arti kedua adalah masyarakat beradab, karena peradaban juga merupakan turunan dari kata Arab 'tamaddun' atau 'madaniyyah', yang berarti 'peradaban' dalam bahasa Inggris, disebut '*civilized*' atau 'beradab'. Oleh karena itu, *Civil society* dengan sebutan ini

---

<sup>12</sup> Sahrul, *Sosiologi Islam*, (Medan: IAIN PRESS. 2011), 129.

dapat diidentikkan dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang memelihara nilai-nilai beradab atau beradab.<sup>13</sup>

Menurut catatan sejarah, 13 tahun setelah Nabi menetapkan landasan tauhid sebagai landasan dasar masyarakat (komunitas Mekah), Allah memerintahkannya untuk pindah ke Yastrib. Sesampai di sana, Yastrib diubah namanya menjadi Madinah oleh Nabi SAW, yang berarti kota. Dengan demikian, tindakan Nabi mengganti nama Yastrib menjadi Madinah pada hakikatnya merupakan pernyataan atau niat proklamasi untuk membangun masyarakat yang beradab bersama umatnya.<sup>14</sup> Sebagai serangan balik terhadap masyarakat Mekkah yang jahil. Ini adalah tonggak awal dari masyarakat beradab maju yang diselenggarakan oleh Islam.

Di Madinah Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan anggota masyarakat Madinah merumuskan syarat-syarat hidup bersama yang disebut Piagam Madinah, yang secara khusus meletakkan dasar-dasar masyarakat madani, bahkan dalam dokumen ini Wawasan manusia menjadi kebebasan, keadilan, partisipasi dan egalitarianisme diperkenalkan untuk pertama kalinya. Hal ini seperti firman Allah yang tertuang dalam (QS Ali Imran: 104) sebagai berikut.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh anggota masyarakat yang ikut serta dalam perumusan Piagam Madinah, apapun keyakinan agamanya. Orang-orang Yahudi Madinah berpartisipasi dalam pembuatan piagam bersejarah itu. Oleh karena itu, semua komponen masyarakat sipil terlibat, persis seperti yang dilakukan Nabi di Madinah selama sepuluh tahun, menciptakan masyarakat yang adil, terbuka, dan demokratis

---

<sup>13</sup> M. Ihsan Dacholfany, "Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam", STAIN Jurai Siwo Metro, h. 15.

<sup>14</sup> Nurcholish Madjid, "Menuju Masyarakat Madani", *Jurnal Ulumul Qur'an*, 2 no 7 (1996), 51.

yang penuh iman dan taqwa.<sup>15</sup> Hal ini juga termuat dalam (QS Ali Imran: 110) sebagai berikut.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."

Dalam istilah modern, "Madinah" berarti semangat dan makna "masyarakat madani". Ini adalah istilah bahasa Inggris yang berarti "masyarakat yang santun, beradab, tertib" yaitu negara yang baik. Untuk memahami makna ini, kita perlu mengetahui kata hikmah dalam bahasa Arab, yaitu "al-insan-u madniy-un bi al-tab'-i". ("manusia menurut naturnya adalah bermasyarakat budaya" (setara dengan pepatah Yunani terkenal yang mengatakan Manusia adalah "Binatang Politisi").<sup>16</sup>

masyarakat madani lebih terkait dengan penciptaan peradaban. Kata al-din biasanya diterjemahkan dengan agama dan mengacu pada arti al-tamaddun atau peradaban. Keduanya digabungkan dalam arti al-Madinah, yang secara harfiah berarti kota. Itulah sebabnya masyarakat madani adalah sekelompok hal yang mencakup agama, peradaban, dan kota. Agama adalah sumber dari hal-hal ini, dan peradaban adalah proses perkembangannya, dan yang menjadi hasilnya merupakan masyarakat perkotaan.<sup>17</sup>

Peneliti Muslim Azyumardi Azra sependapat dengan Nurkholish Majid bahwa Untuk hidup dalam masyarakat yang beradab, kita perlu memiliki sikap toleransi. Ini berarti bahwa kita dapat menerima pendapat orang yang berbeda, meskipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat kita. Hal ini juga

<sup>15</sup> Nurcholish Madjid, "Menuju Masyarakat Madani", *Jurnal Ulumul Qur'an*, 2 no 7 (1996), h. 53.

<sup>16</sup> Dawam Raharjo, dkk, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar. 2000 ), 80.

<sup>17</sup> Nurdinah Muhammad, "Masyarakat Madani Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Mu'ashirah*, 14 no 1 (2017), 22.

menyangkut untuk menerima perbedaan politik antarwarga yang berbeda-beda.<sup>18</sup>

### **b) Perbedaan Masyarakat Sipil (*Civil Society*) dan Masyarakat Madani**

Secara umum, konsep masyarakat madani tidak jauh berbeda dengan konsep *civil society* yang berlandaskan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun, jika *civil society* hanya merupakan paradigma politik, maka pengertian masyarakat madani lebih bersifat religius. Masyarakat madani adalah sekelompok orang yang bukan bagian dari pemerintah. Mereka bekerja untuk memperbaiki cara kerja masyarakat, dan mereka bisa berasal dari kelompok atau latar belakang apa saja. Anwar Ibrahim, mantan menteri keuangan Malaysia, menciptakan istilah "Masyarakat madani" di Indonesia. Di Malaysia, masyarakat sipil pertama kali diperkenalkan oleh Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam. Namun belakangan para sarjana Indonesia, khususnya sarjana Islam, menerima istilah tersebut sebagai terjemahan dari masyarakat sipil (*Civil Society*).

Dalam hal ini, istilah "masyarakat madani" jelas berkaitan erat dengan pengertian awal *civil society* dari perspektif transisional. Jadi masuk akal untuk menyamakan *civil society* dengan masyarakat madani, sekalipun istilah masyarakat madani dan *civil society* jelas memiliki sisi yang berbeda. *Civil society* sendiri memiliki hubungan historis dengan Barat, dan masyarakat madani pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki hubungan historis dengan Islam. Namun terlepas dari latar belakang sejarah yang berbeda, nilai-nilai kesetaraan, keadilan, partisipasi, inklusi, dan supremasi hukum di antara keduanya tetap menjadi prinsip dasar masyarakat yang lebih beradab.<sup>19</sup>

### **c) Karakteristik Masyarakat Madani**

masyarakat madani tidak berjuang sendiri. Melainkan berasal dari sebuah proses yang perlu mendukung faktor-faktor sosial yang membentuk masyarakat madani itu sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, (Bandung: PT.Remaja Karya. 1999), 34.

<sup>19</sup> M. Ihsan Dacholfany, "Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam", STAIN Jurai Siwo Metro, h. 14.

<sup>20</sup> Ihsan Hamid, "Urgensitas Masyarakat Madani Civil Society dalam Mengurai Problematika Sosial: Suatu Tinjauan Terhadap Varian Konflik di Lombok", *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 2 no 1 (2019), 57.

Menurut Arendt dan Habermas, unsur-unsur sosial utama yang harus dimiliki masyarakat madani antara lain:<sup>21</sup>

- a. *The Free Public Sphere*, secara teori ruang publik dapat didefinisikan sebagai suatu kawasan dimana individu sebagai warga negara dapat berpartisipasi secara penuh dalam setiap kegiatan publik. Warga negara berhak untuk secara mandiri menyatakan pendapatnya, membentuk perkumpulan, mengumpulkan, dan menerbitkan publikasi yang memiliki kaitan dengan kepentingan orang banyak. Sebagai prasyarat, Pengembangan dan implementasi masyarakat sipil dalam masyarakat, di ruang publik yang bebas merupakan bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan membatasi adanya ruang publik yang bebas dalam masyarakat sipil, maka akan mengundang penguasa yang tiranik dan otoriter menekan kebebasan warga negara untuk mengekspresikan keinginannya demi kepentingan publik.
- b. Demokratis adalah entitas konsultatif wawancara masyarakat di mana seorang individu memiliki kebebasan penuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Bukannya memahami demokratisasi sebagai pembenaran terhadap negara, demokratisasi dipahami sebagai upaya perbaikan. Dengan demikian, demokrasi kembali menjadi pusat pembentukan masyarakat madani.
- c. Toleransi adalah sikap yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat madani, yang berusaha untuk saling menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Oleh karena itu, keberadaan sikap toleran juga menjadi salah satu faktor penting pendukung terciptanya masyarakat madani.
- d. Pluralisme atau kemajemukan, adalah ikatan keragaman sejati dalam ikatan kebhinekaan dalam balutan peradaban. Dalam pandangan Majid, juga erat kaitannya dengan pemahaman sikap terhadap orang lain, yang jelas dibutuhkan oleh masyarakat yang majemuk. Dalam Islam, keberagaman itu adalah ketetapan Tuhan dan harus kita terima bersama sebagai keindahan romantis dalam kehidupan bermasyarakat. Pluralisme juga tertuang dalam salah satu ayat Al-Quran (QS Hujarat ayat 13).

---

<sup>21</sup> M.Mawardi, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Madani," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4 no 1 (2008), 21.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

- e. Keadilan sosial, syarat utama lain untuk menciptakan Masyarakat madani adalah wujud dari keadilan sosial. Keadilan sosial di sini mengacu pada keadilan yang harus dirasakan oleh masyarakat yang telah dianugerahi hak-hak ekonomi, politik dan lainnya dari negara.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau literatur review merupakan salah satu hal penting dalam membuat karya tulis ilmiah, pengambilan penelitian terdahulu biasanya berasal dari berbagai macam karya seperti jurnal, artikel, buku, makalah, majalah dan beberapa karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasana dari penulis, dan isi dari literatur review terdiri dari rangkuman, ulasan dan juga pemikiran dari penulis sebelumnya. Dan dari penjelasan itulah pada penelitian ini penulis mengumpulkan reverensi dari beberapa karya ilmiah yang membahas kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau juga disebut public private partnersip. Dan berikut dibawah ini merupakan beberapa kajian referensi yang di ambil dari jurnal dan skripsi yang dijelaskan penulis sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rina Cahyaningrum pada tahun (2012) dengan judul "Kerjasama Pemerintah dan LSM PATTIRO Dalam Program Pemeliharaan Kesehatan masyarakat Surakarta". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalin dengan Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiroy berjalan dengan mulus, yang dibuktikan dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta, angka Kesehatan Penduduk Surakarta meningkat dan angka masyarakat yang puas kepada pelayanan kesehatan yang diberikan di Surakarta cukup baik. Penelitian yang dilakukan Rina Cahyaningrum mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yang sama-sama membahas



tentang kerjasama pemerintah dengan swasta ataupun lembaga masyarakat. Selain itu, dalam pengambilan metode penelitian juga mempunyai kesamaan yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif. Akan tetapi ada perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu mengambil objek kerjasama dalam hal pemerliharahan kesehatan masyarakat sedangkan penelitian penulis berfokus dalam hal penanganan covid-19.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Asikin pada tahun (2013) dengan judul “Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Penyelesaian Infrastruktur Publik”. Praktek kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder dalam pembangunan infrastruktur publik telah menjadi prasyarat di Indonesia untuk mempercepat laju pembangunan (di daerah), terutama untuk membangun infrastruktur yang menunjang kebutuhan untuk masyarakat. seperti lembaga pendidikan, rumah sakit, pasar dan fasilitas lainnya. Peraturan hukum yang ada masih memiliki kesenjangan standar, standar yang saling bertentangan dan standar yang tidak jelas, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik dan berdampak pada banyak peraturan daerah karena daerah diperkenalkan sehubungan dengan kerjasama antara lembaga pemerintah dan pihak swasta. Dalam Zainal Asikin ini menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti memfokuskan untuk membahas perjanjian yang ada dalam kerjasama antara pemerintah dan swasta.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Ria Septi Oktavia pada tahun (2016) dengan judul “Manajemen Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Mengelola Penumpukan Sampah Di Kota Pekanbaru”. Penulis memfokuskan permasalahan pada empat indikator yaitu fungsi administrasi yang dapat menjelaskan bagaimana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan swasta bekerja sama memperbaiki pengelolaan sampah di Pekanbaru. PT. Multi Core Use (MIG) telah mengidentifikasi cara untuk mengurangi jumlah sampah di kota, penulis mengkaji teori George R. Terry yang meliputi indikator sebagai berikut: Plan (Perencanaan), Organize (Organisasi), Mobilisasi / Kontrol (Aktif), Kontrol (Kontrol). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil kajian, Pekanbaru menggandeng PT Multi Inti Guna (MIG) bertanggung jawab atas pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru. Meski populer, masih banyak sampah di jalanan. Pemerintah kota dan sektor swasta tidak selalu dapat bekerja sama dengan lancar, karena TPS Kota Pekanbaru masih banyak menumpuk sampah, terutama di kawasan swasta.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arimurti Kriswibowo dkk, pada tahun (2021) dengan judul “Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun”. Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh belum memadainya infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Madiun untuk pengolahan limbah medis ini, termasuk pembakarannya (insenerator). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, Kerjasama untuk pengelolaan Sampah Medis COVID-19 antara dinkes Kota Madiun dengan PT. Triata Mulia. Akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan mulai tanggal 2 November 2020. Perusahaan yang memiliki izin untuk menangani limbah medis, PT. Triata Mulia Indonesia, dipilih untuk bekerja sama dengan dinas kesehatan di Madiun karena memiliki pengalaman dan izin untuk melakukannya. Kerja sama antara keduanya berjalan dengan baik karena kedua belah pihak menjalankan peran yang ditugaskan dengan benar.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Idharulhaq pada tahun (2021) dengan judul “Pola Kemitraan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bima”. Pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bima merupakan tanggung jawab bersama dan yang lebih penting lagi sebagai pemegang kekuasaan dan kebijakan Pemerintah di Kabupaten Bima, dalam hal ini pentingnya peran Dinas Kesehatan Kabupaten Bima agar melaksanakan pembangunan tempat kesehatan untuk masyarakat di Kabupaten Bima. Penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, Terkait kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Kemenkes bekerja sama dengan BPOM Kabupaten Bima untuk membangun kesehatan masyarakat melalui kegiatan berkelanjutan terkait pentingnya produksi pangan yang bernilai gizi tinggi, higienis dan bergizi, sehingga masyarakat yang mengkonsumsinya dapat meminimalisir terjadinya penyakit, dan dengan makanan yang bergizi dan higienis tidak hanya dapat meningkatkan potensi kesehatan tubuh dan mencegah masuknya bakteri, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Fawwaz Aldi Tilano dan Sri Suwitri pada tahun (2017) dengan judul "*Collaborative Government* Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang". Kondisi awal dari kerjasama semacam ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pemangku kepentingan tidak seimbang dan kekuatannya berbeda, sehingga para

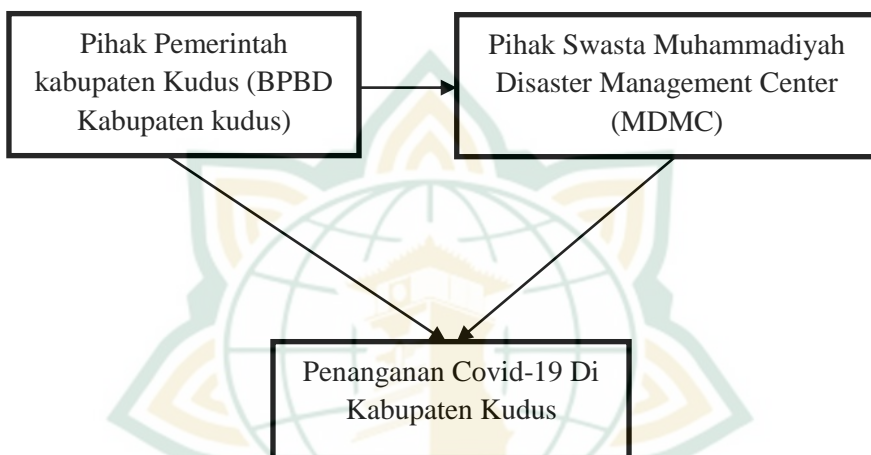
pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerjasama memiliki tingkat kepercayaan dan komitmen yang tinggi, yang dapat digunakan sebagai modal yang baik. Pelaksanaan kerjasama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diakhiri dengan fenomena kondisi awal, desain kelembagaan dan proses kerjasama, namun masih terdapat fenomena yang belum terlaksana secara maksimal yaitu fenomena kepemimpinan dakwah kerjasama. Ada empat faktor co-manajemen yang terlibat dalam pelaksanaan keselamatan lalu lintas dan lalu lintas jalan di kota Semarang, yaitu: struktur jaringan, komitmen pada tujuan bersama, tanggung jawab/tanggung jawab bersama, berbagi. Salah satu kendala pengelolaan bersama terkait pelaksanaan keselamatan jalan dan pengelolaan jalan di Kota Semarang adalah akses terhadap sumber daya manusia yang dimiliki masing-masing instansi.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Ardian Prabowo dkk pada tahun (2021) dengan judul "Model *Collaborative Government* Dalam Pembangunan Desa Pada Masa Covid-19: Studi di Kabupaten Lampung Selatan". Para peneliti mengusulkan model *Collaborative Governance* 'egg' Tujuannya adalah untuk melaksanakan inovasi yang bertanggung jawab melalui pengelolaan bersama dengan memaksimalkan peran pemerintah desa sebagai penyedia platform dan mendorong aliansi antara sektor swasta dan masyarakat. Hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder yang terlibat masih belum menyatu, sehingga peranan program tidak dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat lainnya seperti masyarakat dan dunia usaha. Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan dekriptif kualitatif. keinginan yang ingin di capai dari proses collaborative governance ini adalah untuk meningkatkan status desa dengan beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Pembangunan dan Migrasi Nomor 2 Tahun 2016 untuk Daerah Tertinggal Indeks Pembangunan Desa yang di keluarkan oleh Kementerian Desa. Tujuan dilakukannya pembangunan di wilayah perdesaan melalui pengelolaan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. .

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka tersebut mencakup model bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting dalam penelitian. Jadi, penting untuk memiliki penjelasan teoritis tentang bagaimana aturan kerja antar variabel yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan

variabel terikat. Pada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif kerangka berpikir memiliki sifat opsional mungumpukan dan menganalisis sumber data lapangan yang diperoleh, kerangka berpikir terjadi dalam bentuk skematik. Untuk memahami alur frame explorer dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Gambar diatas menjelaskan kerjasama yang di jalin oleh BPBD Kabupaten Kudus dengan MDMC Kudus dalam menangani wabah Covid yang berada di kabupaten Kudus. Adanya pihak swasta yang disini yaitu MDMC dapan membantu pemerintah kabupaten kudus dalam menangani Covid-19 secara merata mengingat lebih dekatnya MDMC kepada masyarakat. Kerjasama ini menggunakan teori *Collaborative Governance* yang melibatkan pihak swasta ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam kerjasama dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus.